

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurialprudece) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudece)', *Kencana Predana Media Group*, Jakarta (2009)
- Ansori, Abu Ayub, and Ria Angin, 'Mekanisme Penyaluran Tenaga Kerja Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso', *Jurnal Politico*, 18 (2018), 130–43
- Ariani, Nevey Varida, 'Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum*, 18 (2018), 115–26
- Arpangi, 'Legal Protection On Indonesian Labor In Abroad', *International Journal of Law Reconstruction*, II (2018), 53–62
- Astrika, Lusua, 'Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Yang Akan Diberangkatkan Ke Luar Negeri', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1 (2015), 99–109
- Bareta, Rizky Dian, and Budi Ispriyarso, 'Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2018), 163–81
- Butsi, Citra Berlian, Saleh Soeaidy, and Minto Hadi, 'Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI', *Jurnal Admisnitasi Publik*, 1 (2013), 1313–22
- Cahyadi, Thalys Noor, 'Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)', *Jurnal RechtsVinding*, 2 (2013), 17–30
- Husni, Lalu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol: 23, N (2011), 150–67
- Kiwang, Amir Syarifudin, David D.W. Pandie, and Frans Gana, 'Analisis Kebijakan Dan Efektivitas Organisasi', *Jurnal Kebijakan & Admisnitasi Publik*, 19 (2015), 71–84
- Larasati, Donna Savira, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Hak TKI Dari Praktik Underpayment Di Hongkong', *Journal Of Internasional Relations*, 4 (2018), 360–66
- Norhan, Linda, and Tedi Kustandi, 'Sistem Informasi Pendataan Tenaga Kerja Indonesia Berbasis WEB Pada PT . Laatanas Lintas Internasional', *Jurnal Mantik Penusa*, 3 (2019), 225–31

- Nova, Maria, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Lex Admisnistratum*, V (2017), 73–80
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Jurnal Hukum*, 6 (2017), 1–12
- Sari, Eva Dian, and Lu Sudirman, 'Analisis Yuridis Tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam', 1 (2019), 55–74
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', *Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2007)
- , 'Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat', *Rajawali, Jakarta* (1980)
- Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Suatu Pengantar', *Rajawali Pers, Bandung* (1996)
- Tjitrawati, Aktieva Tri, 'Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia', *Jurnal Mimbar Hukum*, 29 (2017), 54–68
- Triantoro, Bambang Wicaksono, 'Migrasi Legal Dan Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Migrasi Internasional Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Hukum*, 10 (1999), 1–16
- Trisnawan, Faisal Akbar, Sonhaji, and Budi Ispriyarso, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Hukum*, 5 (2016), 1–14

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia